

Model Pendidikan Politik: Studi Kasus PKS DPD Sleman, Yogyakarta

**Oleh: Nasiwan
FIS Universitas Negeri Yogyakarta**

Abstract

This article is based on a research study conducted to achieve some understanding of the model of political education employed by the regional branch of the political party called Partai Keadilan Sejahtera in the Sleman Regency, Yogyakarta. The central theme of the study was what model of political education was employed by the party to produce members possessing simultaneously adequate loyalty to the party as well as an active participant's political awareness and culture.

The study was conducted by using as its main method a study of the literature complemented with in-depth interviews with those considered knowledgeable of the information required for the interest of the study. The data obtained were then analyzed by means of a method of critical analysis.

The results of the study indicate that, first, in anticipation of the 2004 general elections, the regional branch of the party has conducted political education for its members as well as the public, second, that branch has employed a model of political education specific in terms of learning objectives, structure of learning materials, management of the teaching-learning process, and learning participants, and, third, the model of political education employed can be developed for appropriate employment by other political parties.

Key words: political education, Partai Keadilan Sejahtera, general elections

Latar Belakang Permasalahan

Urgensi dari kehadiran partai politik tersebut antara lain dapat dilihat pada perannya dalam melakukan pendidikan politik kepada warga masyarakat. Dengan pendidikan politik tersebut masyarakat memungkinkan untuk memiliki kebudayaan politik yang ideal, yakni kesadaran untuk disatu sisi mendukung sistem politik dan sekaligus mampu memberikan kritik serta koreksi.

Sehubungan dengan peran partai politik dalam menjalankan fungsi dan perannya melakukan kegiatan pendidikan politik bagi para pemilih, kiranya sangat menarik untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana sebuah partai politik melakukan proses pendidikan politik baik kepada anggota dan warga masyarakat.

Beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi kajian ini memilih PKS sebagai objek kajian antara lain; Perolehan Suara pada Pemilu Legislatif 5 April 2004 yang diraih oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada tingkat nasional mengalami kenaikan sekitar 500%, partai ini juga berhasil memenangkan di Daerah Pemilihan Jakarta, demikian juga di Kabupaten Sleman, Yogyakarta mengalami kenaikan 488%. PKS di Kabupaten Sleman perolehan kursinya di DPRD mengalami peningkatan yang sangat signifikan di dibandingkan dengan perolehannya pada Pemilu 1999. PKS pada Pemilu 1999 hanya mampu meraih dukungan 13287 (2,64%) suara dengan 1 kursi di Lembaga DPRD Sleman. Sedangkan pada Pemilu 2004 berhasil meraih 6 kursi, dengan total perolehan suara 47644 (10,11%), perolehan kursi PKS di Kabupaten Sleman pada Pemilu 2004 mampu menyamai perolehan partai-partai besar lainnya seperti Golkar, PPP dan PKB (Dokumen hasil Pemilu tahun 1999 dan Pemilu 2004 DPD PKS Sleman).

Partai ini disamping secara kuantitatif mengalami perluasan dukungan dari masyarakat dari sisi kualitatif PKS juga memberikan bacaan baru tentang perilaku budaya politik yang santun ketika berkampanye, berani, peduli dengan nasib orang-orang yang terpinggirkan, juga memiliki sikap kritis kepada politik pemerintah yang merugikan

kedaulatan bangsa Indonesia dalam politik luar negeri. Karakteristik tersebut menarik dicermati apakah merupakan hasil dari suatu pendidikan politik.

Pertimbangan berikutnya berkaitan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 di Indonesia diselenggarakan dengan menggunakan sistem Pemilu model baru. *Pertama*, terdapat dua kali pemilu, masing-masing pemilu pada 5 April 2004 untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan DPR Daerah (DPRD), dan Pemilu 5 Juli 2004 untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. *Kedua*, model Pemilu untuk anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten juga menggunakan sistem yang baru yaitu model *stelsel* daftar terbuka, sedangkan untuk pemilihan anggota DPD akan menggunakan model sistem distrik berwakil banyak.

Pemilihan dan pelaksanaan model baru pada Pemilu 2004 memberikan peluang terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan pemilihan bagi para pemilih baik pemilih yang lama maupun pemilih pemula. Kesalahan dalam melakukan pencoblosan bisa mengakibatkan rusaknya kartu suara dan hal ini akan berimplikasi pada tidak sahnya suara pemilih. Jika kejadian tersebut menimpa banyak pemilih, maka berarti akan menghilangkan aspirasi politik rakyat yang juga akan mengurangi kualitas proses dan hasil Pemilu. Akibat tersebut akan terus berangkaik pada dipertanyakannya lembaga-lembaga politik yang dihasilkan dari proses pemilu yang kualitasnya dipertanyakan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukan sosialisasi kepada para calon pemilih dalam bentuk pendidikan politik untuk pemilih.

Mempertimbangkan argumen di atas, maka dipandang sangat penting untuk melakukan pengkajian yang berkaitan dengan tema peran partai politik dalam pendidikan politik bagi pemilih pada Pemilu 2004. Adapun masalah inti yang dibahas dalam penelitian ini adalah;

1. Apakah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Sleman, Yogyakarta secara efektif melakukan pendidikan politik bagi para pemilih pada Pemilu 2004?

2. Bagaimanakah model pendidikan politik yang dilakukan PKS DPD Sleman?

Kajian Teori

Pendidikan Politik

Dalam konteksnya dengan pendidikan bagi para pemilih menjelang Pemilu 2004, pendidikan politik dimaknai sebagai usaha yang terencana, dengan sadar untuk memberikan penyadaran kepada warga negara yang sudah berhak memilih (Alfian, 1990:245). Usaha penyadaran tersebut dilakukan agar para pemilih tersebut memahami urgensi peristiwa Pemilu.

Pendidikan politik bagi para pemilih menjelang Pemilu 2004, memiliki makna yang strategis dan mendesak untuk dilakukan. Hal tersebut dikarenakan Pemilu 2004 memberikan peluang untuk timbulnya distorsi yang menyimpang dari prinsip-prinsip yang paling mendasar dari demokrasi. Ada beberapa aspek penting yang dikeluhkan oleh kalangan pro demokrasi berkaitan dengan Pemilu 2004. Antara lain: (1) adanya kecenderungan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilu, ada bukti-bukti yang kuat lebih merupakan kompromi dan tarik-menarik kepentingan partai politik yang lebih berorientasi jangka pendek daripada berorientasi untuk kepentingan bangsa; (2) sebagai akibat aturan main yang dihasilkan mengambang tidak jelas misalnya apakah mau menggunakan sistem distrik atau sistem Pemilu proporsional; (3) dengan tidak jelasnya sistem Pemilu sebagai hasil kompromi (politik dagang sapi) maka rekrutmen anggota legislatif tetap saja menghidup-suburkan oligarki partai, anggota legislatif belum bisa menjadi perwakilan aspirasi masyarakat; (4) walaupun Pemilu presiden secara langsung tetap saja ada distorsi dan diskriminasi, karena calon presiden merupakan monopoli bagi partai yang menang, karena calon independen dan partai-partai yang diperolehnya di bawah 3 % menjadi tidak memiliki hak untuk ikut dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.

Pendidikan politik diperlukan bukan saja bagi para pemilih yang kurang (belum) memiliki pemahaman tentang persoalan politik tetapi juga bagi para pemilih yang sudah memiliki pengetahuan tentang persoalan politik. Hal demikian dikarenakan sikap apatis pada aktivitas politik dimungkinkan dapat muncul dari kalangan masyarakat yang memiliki pengetahuan yang mendalam dan luas pada persoalan politik. Hal ini juga dikarenakan frustrasi, kecewa dengan realitas politik yang jauh dari idealitas.

Dengan kata lain pendidikan politik memiliki makna yang penting dan strategis dalam rangka mendorong agar warga negara (para pemilih) untuk memiliki pengetahuan politik yang memadai, sekaligus kesadaran akan suatu pentingnya sistem politik yang ideal. Di sisi lain, pendidikan politik juga memberikan pemahaman pada warga negara bahwa untuk merubah realitas politik yang ada menuju suatu sistem politik yang ideal, yang antara lain ditandai adanya perubahan kebudayaan politik baru. Kondisi seperti ini yang sering menggoda kalangan masyarakat yang idealis menjadi apatis dan sebagian lagi *golput* (golongan putih).

Disinilah letak urgensi pendidikan politik. Disatu sisi ia dapat berfungsi sebagai sosialisasi politik (pelestarian nilai-nilai politik) lama yang dianggap baik. Disisi lain, pendidikan politik dapat berfungsi untuk melakukan pembaharuan politik (reformasi politik), suatu perubahan politik yang *predictable*, dan terencana.

Materi-materi yang diperlukan bagi pendidikan politik khususnya untuk para pemilih adalah diantaranya sebagai berikut;

- 1) Undang-undang yang mengatur tentang jaminan warga negara dalam kehidupan politik, khususnya dalam Pemilu.
- 2) Prinsip-prinsip penting dalam proses Pemilu sesuai dengan ajaran demokrasi;
- 3) Tahap-tahap Pemilu;
- 4) Urgensi Pemilu bagi warga negara Indonesia;

- 5) Peran serta warga negara dalam Pemilu, khususnya dalam pengawasan.
- 6) Memilih partai politik yang sesuai dengan aspirasi rakyat;
- 7) Simulasi melakukan pencoblosan;
- 8) Pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu;
- 9) Kiat-kiat memantau Pemilu;
- 10) *Workshop* tentang pemantauan Pemilu.

Sistem Pemilu

Sistem Pemilu merupakan salah satu mekanisme kelembagaan terpenting dalam menentukan watak persaingan politik karena sistem-sistem ini merupakan wahana politik yang paling mudah dimanipulasi (Reilly, 1999:18). Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa, menurut Ben Reilly (1999:18), sistem pemilu dapat dengan sengaja dirancang untuk mencapai hasil tertentu. Potensi luar biasa rancangan sistem Pemilu untuk mempengaruhi perilaku politik adalah sedemikian rupa, sehingga dapat memberi manfaat bagi perilaku politik tertentu dan menimbulkan hambatan tertentu. Dari sinilah nampak bahwa desain sistem Pemilu dapat menjadi satu alat rekayasa konstitusional yang akan digunakan dalam mengurangi konflik di tengah masyarakat yang masih terpecah-pecah.

Pada dasarnya, sistem-sistem Pemilu dirancang untuk melaksanakan tiga tugas pokok. *Pertama*, menerjemahkan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilu menjadi kursi di badan-badan legislatif. *Kedua*, sistem Pemilu bertindak sebagai wahana penghubung yang memungkinkan rakyat dapat menagih tanggung jawab atau janji-janji wakil-wakil yang mereka pilih. *Ketiga*, sistem Pemilu mendorong pihak-pihak yang saling bersaing pengaruh supaya melakukannya dengan cara yang tidak sama (Reilly, 1999:18).

Pilihan terhadap sistem Pemilu dapat dilihat dari seberapa dekat sistem ini menerjemahkan suara yang diperoleh secara nasional menjadi

kursi parlemen, yaitu berapa tinggi tingkat proporsionalitasnya. Dari sini kemudian dikenal sistem Pemilu yang utama terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu sistem Pluralitas-Mayoritas, Semi Proporsional, dan Perwakilan Proporsional (International IDEA, United Nations, dan IFES, 2001:82-108; Reilly, 1999:19-21). Sistem Pluralitas-Mayoritas terdiri dari dua sistem pluralitas, yaitu *First Past the Post* (FPTP) dan Suara Blok (*Block Vote*), serta dua sistem mayoritas, yaitu Suara Alternatif (*Alternatif Vote*) dan Dua Babak (*Two Round*).

Sistem semi-proporsional merupakan sistem pemilu yang secara mendasar menerjemahkan jumlah suara yang diperoleh menjadi kursi yang dimenangkan dengan cara-cara yang ada diantara proporsionalitas sistem proporsional dan kemayoritasan sistem pluralis-mayoritas (Reilly, 1999:20). Kedua sistem pemilihan Semi Proporsional yang dipergunakan untuk pemilihan legislatif adalah suara tunggal yang tidak dapat dialihkan (*Single Non-Transferable Votes*), sistem paralel (atau sistem campuran, *Mixed*) dan *Limited Vote*.

Sistem Pemilu Perwakilan Proporsional (*Proportional Representation Sistem*) didasarkan pada pemikiran untuk secara sadar mengurangi ketimpangan antara jatah suara nasional sebuah partai dengan jatah kursi di parlemen. Sistem perwakilan proporsional ini terbagi dalam tipe Sistem Daftar Proporsional Perwakilan (*Lists Proportional Representation*), Sistem Campuran (*Mixed Member Proportional*), dan sistem *Single Transferable Vote*.

Dari sistem Pemilu yang pernah dilaksanakan sejumlah negara di dunia, semua akan kembali kepada panitia penyelenggara Pemilu itu sendiri, sehingga dapat menentukan legitimasi dan akseptabilitas proses dan hasil Pemilu yang dicapainya. Legitimasi dan akseptabilitas tiap-tiap Pemilu akan tergantung banyak faktor, tetapi integritas penyelenggaraan (administrasi) Pemilu adalah salah satu faktor paling penting (International IDEA, 1997:8). Publik akan mengukur legitimasi suatu Pemilu atas dasar integritas aktual administrasinya dan penampilan integritas proses Pemilu tersebut. Karenanya, maka para peserta (kan-

didat), partai politik, dan para pemantau Pemilu akan memberi perhatian khusus terhadap cara-cara penyelenggaraan Pemilu menunjukkan fungsi-fungsinya (Internatioanl IDEA, 1997:8).

Partisipasi Politik

Istilah “partisipasi politik” telah digunakan dalam pelbagai arti. Huntington (1994:6) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Definisi ini mensyaratkan bahwa yang tercakup dalam partisipasi politik adalah kegiatan, dengan demikian orientasi-orientasi para warga negara terhadap politik, pengetahuan tentang politik, minat terhadap politik, perasaan-perasaan mengenai politik kompetisi dan keefektifan politik, persepsi-persepsi tentang relevansi politik, itu seringkali juga tidak berkaitan.

Persoalan mendasar yang menjadi perhatian dalam partisipasi politik hanyalah kegiatan politik yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Kegiatan-kegiatan yang demikian difokuskan terhadap pejabat-pejabat umum, mereka yang pada umumnya diakui mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan final tentang pengalokasian nilai-nilai secara otoritatif dalam masyarakat. Sebagian besar dari apa yang dinamakan politik, dan sebagian besar pengalokasian sumber-sumber daya diantara golongan-golongan dalam masyarakat dapat berlangsung tanpa campur tangan pemerintah. Dengan demikian maka besarnya partisipasi politik di dalam suatu masyarakat, sampai tingkat tertentu tergantung kepada lingkup kegiatan pemerintah di dalam masyarakat (Huntington, 1994:7).

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif sebagaimana didefinisikan oleh Bogdan dan Taylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati

(Lexy J. Moleong, 1998:3). Penelitian ini akan mengkaji karakteristik pendidikan pemilih dari partai politik (PKS) Dewan Pimpinan Sleman pada Pemilu 2004.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi, observasi, dan wawancara. Dokumentasi berasal dari sumber primer yang secara resmi dikeluarkan oleh masing-masing partai politik, maupun sumber sekunder dari lembaga independen pendidikan pemilih (Lembaga Swadaya Masyarakat), jurnal, surat kabar, majalah, artikel maupun laporan penelitian. Observasi dilakukan terhadap setiap kegiatan pendidikan pemilih yang diselenggarakan PKS pada Pemilu 2004 pada periode pra kampanye dan saat kampanye pemilu DPR, DPD dan DPRD sampai dengan periode pra kampanye dan saat kampanye Pemilu presiden dan wakil presiden. Wawancara dilakukan terhadap pengurus inti partai politik, seperti ketua atau sekretaris, atau ketua bidang yang menangani bidang pendidikan politik untuk pemilih.

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan induksi analitis. Langkah pertama, yaitu menemukan fakta-fakta tentang kegiatan pendidikan pemilih dari masing-masing partai politik peserta Pemilu 2004, kemudian dilakukan klasifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Dari temuan itu, peneliti akan menyusun satu generalisasi peran pendidikan politik untuk pemilih yang dilakukan oleh partai politik terhadap kualitas pemilu itu sendiri. Hasil kesimpulan tersebut pada gilirannya oleh peneliti akan didialogkan dengan kajian teori yang peneliti pergunakan. Teknik yang dipergunakan untuk mencapai kredibilitas dalam penelitian ini, yaitu melalui (1) wawancara teman sejawat, (2) referensi yang cukup, (3) pengecekan oleh subjek penelitian.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Program Pendidikan Politik PKS DPD Sleman

Dalam literature study politik ada kesepakatan yang sudah diterima oleh komunitas ilmuwan politik bahwa salah satu fungsi dari partai poli-

tik adalah melakukan pendidikan politik (*political education*) kepada warga masyarakat dan lebih khusus lagi kepada anggota, pendukung serta simpatisan partai tersebut. Pendidikan politik tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran politik warga negara, agar warga negara dengan bekal informasi dan pengetahuannya tentang masalah kehidupan politik kenegaraan memungkinkan warga negara tersebut berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik.

Pemaparan dalam bagian ini akan menyetengahkan pembahasan peran partai politik yakni pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam melakukan proses pendidikan politik, lebih khusus lagi pendidikan politik yang berkaitan dengan kegiatan Pemilu tahun 2004, di Daerah kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Program Partai Keadilan Sejahtera DPD Sleman Yogyakarta

Pada uraian ini akan dikemukakan secara umum program yang telah ditetapkan oleh Pengurus PKS DPD Sleman. Dengan melakukan pencermatan pada program secara keseluruhan yang telah ditetapkan tersebut kemudian secara khusus perhatian diarahkan pada program yang berkaitan dengan pendidikan politik khususnya lagi yang berkaitan dengan pendidikan pemilih untuk pelaksanaan pemilu tahun 2004, dengan cara ini akan diketahui bagaimana perhatian PKS pada program-program yang berkaitan dengan pendidikan pemilih serta kontribusinya bagi perbaikan kualitas pemilu di Indonesia.

Secara umum program kerja DPD PKS Sleman merujuk pada Garis-Garis Besar Haluan Kerja DPD PKS Kabupaten Sleman Masa Bakti 2001-2004. Dalam kebijakan dasar ini antara lain ditemukan rumusan visi dan misi PKS untuk masa bakti 2001-2004. Visi tersebut berbunyi, “*Sebagai Partai dengan kader yang tangguh dan organisasi yang solid menuju dukungan publik dan kemenangan Pemilu 2004*”. Adapun misinya adalah ; 1) membenahi sistem pemberdayaan kader; 2) Konsolidasai organisasi; 3) membangun budaya politik dalam bingkai organisasi partai; 4) membangun manajemen dan profesionalisme kerja

pengurus; 5) memperbaiki kemampuan komunikasi publik PKS; 6) Mengoptimalkan pemberdayaan potensi kader perempuan; 7) Pro aktif dalam nahi munkar untuk penyeimbang amar ma'ruf; 8) meningkatkan porsi perhatian terhadap peran pemuda non mahasiswa; 9) membentengi daerah pelosok dari kristenisasi; 10) menggali potensi seni untuk syi'ar partai (Pedoman Pengelolaan Partai DPD PKS Kabupaten Sleman, 1423 Hijriyah).

Visi dan misi yang telah dirumuskan tersebut kemudian dijabarkan dalam kebijakan umum partai masa bakti 2001-2004. Kebijakan umum PKS tersebut meliputi bidang ideologi, politik dan hukum, bidang ekonomi, bidang perempuan, bidang pemuda, bidang sosial dan pendidikan. (Pedoman Pengelolaan Partai, DPD PKS Kabupaten Sleman, 1423 Hijriyah).

Dari kebijakan dasar dan umum PKS DPD Kabupaten Sleman sebagaimana dikemukakan diatas dapat dinyatakan bahwa PKS sebagai partai politik yang menamakan dirinya sebagai partai kader, partai ini dalam kebijakan umumnya secara serius juga melakukan advokasi kepada masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan disamping tetap memberikan perhatian yang sangat serius pada masalah pengkaderan. Dari sudut PKS masalah pengkaderan tersebut dapat diklasifikasikan kedalam dua persoalan besar yaitu pembinaan kader yang sudah menjadi anggota partai serta perluasan jumlah kader melalui berbagai model dan instrumen yang dimiliki oleh PKS.

Sekilas tentang Tarbiyyah Tsaqofiyah

Pengurus DPD PKS Kabupaten Sleman merumuskan bahwa *Tarbiyyah Tsaqifiyyah* adalah salah satu proses pembentukan SDM (*Syakhshiyah Da'iyah Mutakamilah*/ Kepribadian Muslim Yang Sempurna) yang bersifat ilzami (menuntut) melalui pembekalan 'ulum islamiyyah (ilmu-ilmu keislaman) kepada seluruh kader-kader da'wah (partai) sesuai dengan tsaqofi (wawasannya). (Sekilas Bersama Tarbiyyah Tsaqofiyah DPD PKS Sleman 2004).

Program pendidikan Politik PKS DPD Sleman dilakukan melalui kegiatan semacam training yang disebut dengan *Tarbiyah Tsaqoffiyah* disingkat TTS. Kegiatan TTS ini sudah berjalan semenjak tahun 2000 yakni bersamaan dengan dicanangkannya *'am tarbawi* atau tahun pembinaan bagi kader-kader PKS. Kegiatan pendidikan politik yang dilakukan melalui TTS ini sampai dengan Bulan Oktober tahun 2004 telah memasuki angkatan ke-10, diikuti oleh 1212 kader PKS yang ada di kabupaten Sleman. Kegiatan ini pada awalnya diikuti oleh kalangan internal PKS namun dalam perjalanannya kegiatan ini juga mampu memperluas pesertanya sampai ke kalangan umum masyarakat walaupun jumlahnya pada awalnya tidak sebanyak kalangan internal.

Materi yang diberikan dalam kegiatan TTS antara lain meliputi; Dasar-Dasar Ajaran Islam; Problematika Ummat Islam; Tsaqofah Islamiyah; Sosial Politik Islam I; Sosial Politik Islam II; Fiqih Da'wah I; Fiqih Da'wah II; Fiqih Da'wah III; Dakwah melalui Politik; Rumah Tangga Muslim I; Rumah Tangga Muslim II; Manajemen Diri; Marhalah Perjuangan.

Tarbiyyah Tsaqofiyah (TTS) ini terdiri dari tiga jenjang pendidikan yaitu Jenjang Dasar selama 6 semester, Jenjang Menengah Selama 4 Semester, Jenjang Atas Selama 4 semester. Adapun alokasi waktu untuk setiap mata kuliah ditentukan selama 90 menit. Setiap peserta membayar sebesar Rp 7500 untuk setiap semesternya untuk semua jenjang.

Profil peserta yang mengikuti TTS sekitar 80% terdiri dari mahasiswa dan pelajar dan sekitar 20% berasal dari masyarakat umum. Dilihat dari jenis kelaminnya TTS ini kebanyakan diikuti oleh kaum wanita. Sedangkan intensitas kehadiran mengikuti kuliah dari seluruh peserta yang mendaftar sebagai peserta TTS adalah sekitar 70%.

Instruktur yang menjadi pengajar di TTS dilihat dari latarbelakang pendidikannya dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu instruktur yang berlatarbelakang pendidikan pesantren, instruktur yang memiliki latarbelakang pendidikan umum, serta instruktur yang memiliki latar belakang pesantren plus umum.

Masing-masing instruktur mengampu mata kuliah yang sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya. Untuk instruktur yang berlatarbelakang pesantren mengampu mata kuliah yang berkaitan dengan ajaran Islam sedangkan untuk instruktur yang berlatarbelakang umum mengampu mata kuliah yang berkaitan dengan ilmu umum seperti manajemen diri, system sosial Islam, rumah tangga muslim.

Mata Kuliah Sosial Politik Islam

Uraian berikut ini akan memaparkan garis-garis besar Tarbiyyah Tsaqofiyah khususnya untuk materi-materi yang langsung terkait dengan masalah politik, yakni mata kuliah sosial politik Islam I dan II. Pemaparan tentang rincian dari mata kuliah sosial politik Islam dipandang perlu, karena hal tersebut akan memberikan bantuan untuk memahami proses pendidikan politik yang dilakukan oleh PKS.

Mata kuliah sistem sosial Islam tersebut terbagi dalam beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan. Setiap pokok bahasan memiliki tujuan instruksional seperti dikutip pada pemaparan berikut ini.

Pokok bahasan untuk mata kuliah Sosial Politik Islam I meliputi; 1. Perjalanan Gerakan Da'wah Pemuda dan Da'wah di Negeri-negeri Muslim. Pokok bahasan ini terdiri dari beberapa sub bahasan a) Sekilas pemuda Al –Kahfi dan Ibrahimi As. b). Pergerakan pemuda prakemerdekaan, Pasca kemerdekaan dan Kontemporer, c). Gerakan da'wah dalam negeri dan di negeri-negeri muslim.

Pokok bahasan 2. Al- Khasho'isul Amal Syar'iah. Pokok bahasan ini dibagi dalam sub pokok bahasan a) Karakteristik dan ciri-ciri syari'at Islam, b) Ciri moralitas, realitas dan kemanusiaan dari syari'at Islam, c) Ciri universalitas dan keserasian dari syari'at Islam.

Pokok bahasan 3. Tentang da'wah partai. Pokok bahasan ini terbagi dalam sub pokok bahasan a) Landasan syar'ah da'wah partai b) Analisa SWOT kelebihan dan kekurangan perubahan masyarakat melalui pendekatan kepartaian c) Karakteristik partai da'wah

Sedangkan untuk mata kuliah Sosial Politik Islam II, terdiri dari dua pokok bahasan 1) Saluran politik. Pokok bahasan ini terdiri dari a) Hak-hak sosial politik seseorang, b) Wadah-wadah politik c) Perbandingan partai-partai Islam d) Menyalurkan aspirasi dan kegiatan politik. 2) Pendidikan Politik Muslimin. Pokok bahasan ini terbagi atas beberapa sub pokok bahasan a) Esensi pendidikan politik b) tujuan pendidikan politik c) Prinsip-prinsip ideologi pendidikan kaum Muslimin d) Prinsip-Prinsip sosial dalam pendidikan politik kaum muslimin e) Prinsip-prinsip ekonomi dalam pendidikan politik kaum muslimin.

Mencermati kontruksi materi-materi perkuliahan khususnya untuk mata kuliah sosial politik Islam kiranya dapat dinyatakan bahwa pendidikan politik yang dilakukan oleh PKS, memberikan kemungkinan kepada para kader partai untuk memiliki *pengetahuan tentang politik* yang memadai sekaligus mmberikan *peluang tumbuhnya kesadaran politik yang kritis* baik pada sistem politik yang ada maupun kepada kondisi internal partai, serta *memiliki ketrampilan berpolitik* yang diperlukan untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan politik seperti Pemilu. Hal tersebut dimungkinkan untuk direalisasikan karena materi-materi perkuliahan yang diberikan memberikan bekal pengetahuan dan juga ketrampilan yang memadai. Hal tersebut antara lain tercermin dengan adanya materi perkuliahan seperti SWOT gerakan-gerakan politik dan kondisi internal partai, komparasi partai-partai politik juga ada kegiatan simulasi pengawasan Pemilu (Wawancara dengan Ketua DPD PKS Sleman, Oktober 2004, di Kantor DPD PKS Sleman).

Komposisi materi perkuliahan sebagaimana diberikan dalam pendidikan politik PKS, disamping dapat menumbuhkan kesadaran kritis pada diri kader, juga tetap dapat mempertahankan sikap militansi dan loyalitas pada partai karena dalam perkuliahan tersebut juga diberikan materi-materi yang bersifat normatif. Dengan rumusan lain dapat dinyatakan bahwa materi-materi perkuliahan yang diberikan pada pendidikan politik PKS (Tarbiyyah Tsaqofiyah) memberikan potensi

untuk lahirnya orientasi, sikap politik baru yang sangat penting untuk persemaian lahirnya kebudayaan politik baru, yakni orientasi politik yang rasional-kritis tetapi sekaligus juga loyal pada sistem yang telah disepakati.

Cara berfikir yang bersifat makro, keummatan, mendunia dimungkinkan tumbuh dikalangan kader PKS dikaitkan dengan struktur dan komposisi materi perkuliahan pada media pendidikan politik PKS, antara lain dapat dijelaskan bahwa diantara mata kuliah yang diajarkan dalam pendidikan politik (TTS) ada materi-materi perkuliahan yang mampu menumbuhkan munculnya kesadaran berfikir dan politik yang bersifat keummatan-universal sekaligus kaitannya dalam konteks nasional-Indonesia. Materi-materi tersebut antara lain dapat dicermati pada pokok bahasan yang akan dikemukakan berikut ini. Misalnya mata kuliah Tsaqofah Islamiyyah, terdiri dari 4 pokok bahasan; 1. Problematika dan kelemahan kaum muslimin di tingkat nasional maupun internasional; 2. Al- Gazwul Fikr (Perang pemikiran); 3. Zionis Israel; 4. Kristenisasi.

Pokok bahasan 1 yang membicarakan tentang problematika dan kelemahan kaum muslimin di tingkat nasional dan internasional tersebut dirinci lagi dalam sub-sub pokok bahasan sebagai berikut; 1. Problematika kaum muslimin nasional: a) Eksternal : Marginalisasi peran politik, pembodohan ummat oleh penguasa/media Kristiani. b) Internal: Pertikaian dan perpecahan kaum muslimin, kemiskinan dan kebodohan, kejumudan dan kejahilan. 2. Problematika kaum muslimin internasional: masalah Palestina, Zionisme, tekanan dan fitnah Barat terhadap dunia Islam, ketiadaan Khilafah, kelemahan sosial, politik, dan ekonomi. 3. Kelemahan kaum muslimin: Meliputi aqidah, tarbiyyah, tsaqofah, da'wah, organisasi dan akhlak (Garis Besar Progam Tarbiyyah Tsaqofiyah (TTs) Sleman Periode X (Juni- Oktober 2004).

Struktur materi yang diberikan dalam perkuliahan pendidikan politik PKS DPD Sleman sebagaimana dikemukakan diatas yang antara lain membahas masalah ummat Islam di tingkat internasional, tingkat

nasional dipadu dengan pembahasan dalam perkuliahan Sistem Sosial Islam I dan II dan juga didasari oleh pembahasan materi perkuliahan dasar-dasar keislaman seperti kuliah Al Qur'an, Hadist, Akhlak, Da'wah dan Fiqih da'wah memberikan peluang kepada kader-kader PKS yang mengikuti pendidikan politik tersebut untuk memiliki pengetahuan dan kesadaran politik yang luas-mendunia dan kritis. Akan tetapi sikap berfikir kritis dan mendunia tersebut tidak menjadikan kader PKS menjadi kehilangan konteks kenasionalan dan tempat berpijak untuk melakukan amal dan ikhtiar-ikhtiar untuk memecahkan problem yang dihadapi oleh ummat Islam. *Dalam pandangan kader PKS diantara solusi untuk memecahkan problema yang dihadapi oleh Ummat Islam Indonesia adalah dengan melalui Partai Politik Islam.* Melalui instrumen Partai Politik Islam dalam hal ini PKS sebahagian persoalan ummat Islam Indonesia dapat secara bertahap dicarikan solusinya. Perspektif pemikiran tersebut didasarkan pada suatu prinsip yang diyakini oleh kader PKS kegiatan politik haruslah mampu mengantarkan manusia menjadi ummat yang mulia dan memiliki kehormatan. Dalam ungkapan yang sering dipakai oleh kalangan PKS menyatakan bahwa "*syiasah : Tarbiyyatul Insan illa 'Izzah wal karimah*" (Wawancara dengan Ketua DPD PKS Sleman, di Kantor DPD Sleman, Oktober 2004).

Model Pendidikan Politik PKS

Progam partai yang disepakati dan diinstruksikan untuk dilaksanakan dalam rangka melakukan pembinaan kader, yang oleh kalangan internal partai dianggap sebagai bagian dari pendidikan politik ada dua jenis yaitu *Ta'lim Rutin Kelompok (TRK)* dan *Ta'lim Rutin Partai (TRP)*. Antara TRK dan TRP terdapat beberapa perbedaan. TRK adalah kegiatan kajian membahas masalah keislaman yang dilakukan setiap seminggu sekali biasanya berbentuk pemaparan materi diteruskan dengan acara diskusi. Peserta TRK ini berkisar antara 5 sampai 10 orang. Sebelum era partai, artinya sebelum berdirinya partai (PKS) Partai Keadilan kegiatan kajian yang berlangsung setiap minggu sekali ini

sudah lama berjalan sebelumnya kegiatan ini disebut juga Halaqoh.

Dalam kegiatan TRK ini disampaikan hampir seluruh materi keislaman yang menjadi keharusan untuk dikuasai oleh seorang kader PKS. Materi yang dibahas dalam kegiatan TRK ini sangatlah luas dari masalah tauhid-aqidah, masalah dakwah secara umum sampai masalah dakwah melalui partai politik. Dibahas juga masalah-masalah moral, masalah problematika ummat, masalah problem keluarga juga masalah politik internasional yang berkaitan dengan nasib ummat Islam.

Dengan kata lain TRK ini memberikan materi keislaman secara umum dan mendasar serta tidak secara khusus membahas masalah politik saja. Namun menempatkan politik sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam yang diyakini bersifat komprehensif.

Sedangkan TRP, adalah kegiatan yang dilakukan oleh institusi partai sifatnya lebih longgar dengan materi kajian, membahas masalah-masalah yang mudah diterima dan dicerna oleh masyarakat umum. Kegiatan TRP ini nampaknya didisain untuk dapat diikuti oleh orang umum, atau masyarakat pada umumnya, sehingga materi dan penyajiannya pun lebih longgar dan umum.

Dengan menggunakan dua jalur pembinaan tersebut konsolidasi dalam bidang pengkaderan dapat melakukan dua hal penting sekaligus, yaitu melakukan pemantapan kader untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai sumber kekuatan inti dalam melakukan penguatan kelembagaan partai. Serta melakukan perluasan kader dalam rangka memperluas dukungan dan basis social partai. Persoalan yang disebut terdahulu dicapai melalui kegiatan TRK dan persoalan perluasan dukungan partai melalui perluasan dukungan basis social dicapai melalui TRP.

Dengan menggunakan dua jalur pendidikan politik sebagaimana dikemukakan diatas PKS di kabupaten Sleman pada Pemilu 2004 dapat meningkatkan perolehan dukungan dari masyarakat secara signifikan. Peningkatan dukungan yang signifikan tersebut dapat dicermati dari keberhasilan PKS untuk menempatkan wakilnya di DPRD Sleman

untuk semua Daerah Pemilihan (Dapel) yang terdiri dari 6 Daerah Pemilihan. Perolehan ini dibandingkan dengan hasil Pemilu 1999 yang hanya mampu meraih 1 kursi, dapat dibaca sebagai kenaikan dukungan yang signifikan.

Namun jika dikaji lebih mendalam sebenarnya model pendidikan politik sebagaimana dilaksanakan oleh DPD PKS Sleman selama rentang waktu kepengurusan 1999-2004, masih memiliki kelemahan-kelemahan dilihat dari fungsi pendidikan politik yang seharusnya dilakukan oleh sebuah partai politik. Kelemahan-kelemahan tersebut sebagaimana diakui oleh kalangan pengurus DPD PKS Sleman adalah ;

1. Model dan strategi pendidikan politik yang dilakukan oleh PKS baik melalui Ta'lim Rutin Kelompok (TRP) maupun melalui Ta'lim Rutin Partai (TRP) masih menggunakan model yang sifatnya umum. Belum dirumuskan bagaimana model pendidikan yang didisain secara khusus serta berbeda untuk mendekati kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang yang sangat beragam.
2. Model dan strategi pendidikan politik yang dilakukan oleh PKS masih sangat kental dengan kehidupan kelas menengah-perkotaan, sehingga ada kendala-kendala untuk diterapkan untuk kalangan bawah, masih ada kesan elitis. Kelemahan tersebut muncul dikarenakan para perumus dan konseptor model pendidikan politik tersebut adalah dari kalangan kampus yang relatif kering dengan kehidupan kalangan bawah. (Wawancara dengan pengurus bidang Pengkaderan DPD PKS Sleman, Oktober 2004).
3. Model pendidikan politik yang dikenalkan masih sangat kental nuansa keislamannya, sehingga ada kesan partai ini dalam melakukan pendidikan politik, kurang memperhitungkan masyarakat yang non Islam.
4. Model pendidikan politik yang dilakukan belum disertai alat ukur untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dan kegagalannya secara kuantitatif.

5. Model pendidikan politik secara umum masih menekankan pada hal-hal yang bersifat normative, misalnya tentang sistem politik yang ideal, pemimpin yang ideal, tetapi masih kurang perhatiannya pada hal-hal yang bersifat real dan kasus-kasus dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah yang bersifat solutif.

Program Pendidikan Politik Menjelang Pemilu Legislatif

DPD PKS Sleman demikian juga DPD yang lainnya di wilayah DPW PKS DIY mengambil kebijakan yang sama dalam melakukan pendidikan politik pada dua peristiwa Pemilu tersebut. Untuk menyongsong Pemilu Legislatif pada tanggal 5 April 2004 PKS sudah jauh-jauh hari merencanakan dan menyiapkan strategi termasuk didalamnya melakukan pendidikan politik kepada para kader dan masyarakat umumnya (Wawancara dengan Wakil Ketua DPD PKS Sleman dan Pengurus Bidang Pengkaderan).

Pada Pemilu legislatif pendidikan politik pada pemilih yang dilakukan oleh PKS dalam menyongsong Pemilu Legislatif 5 April 2004, dapat dikelompokkan kedalam dua cara yaitu melalui Program Silahturahmi Individu (Prosidu) dan Program Silahturahmi Massal (Prosima). Prosidu adalah program penjangkaran pemilih yang dilakukan oleh setiap kader dengan cara silahturahmi untuk mendapatkan dukungan suara sebanyak 20 suara baru dan pasti pada Pemilu 2004. Sedangkan Prosima adalah sosialisasi partai yang dilakukan secara massal dengan dukungan perangkat program yang telah disiapkan oleh tim aksi (Panduan, Prosidu dan Prosima, DPD PKS Sleman, 2004).

Adapun yang program-program tim aksi yang disiapkan untuk mendukung kesuksesan Prosima adalah; Pertama divisi pemberdayaan. Cakupan tugas dari divisi ini pertama, adalah menyusun program paket ketrampilan bagi ibu-ibu; Kedua, menyusun program paket kegiatan bagi pemuda dan remaja; Ketiga, mengadakan sarasehan dengan unsur kewanitaan dan kepemudaan ditiap DPC; Keempat, memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan ketrampilan bagi ibu-ibu dilingkup kerja

DPC; Kelima, memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan outdoor bagi pemuda dan remaja di lingkup kerja DPC.

Divisi ini terdiri dari bidang pemberdayaan untuk perempuan dan pemberdayaan untuk pemuda-pemudi. Program-program yang dilakukan untuk pemberdayaan perempuan dan pemuda antara lain meliputi Permadani (pernak-pernik dapur dan meja makan ummi), Beranda (Berusaha dengan daya mandiri), sehat (sehat alami untuk ummi dan keluarga), Jerami (jari-jemari ketrampilan ummi), lomba kreativitas ibu. Bedah Film, Training Ustadz dan Ustadzah, Wisata ruhani.

Prosima, selain didukung oleh divisi pemberdayaan perempuan dan pemuda juga dilengkapi dengan divisi pelayanan kesehatan (yankes), divisi pasar murah untuk rakyat, divisi advokasi dan pelatihan, serta divisi hisab dan ru'yah.

Program kampanye sekaligus pendidikan politik kepada para pemilih pada pemilu 2004 yang dilakukan oleh DPD PKS Sleman, melalui Prosima yang dilakukan dengan berbagai variasi yang menyentuh kebutuhan sehari-hari masyarakat dalam realitasnya telah mampu menarik perhatian masyarakat untuk secara langsung maupun tidak langsung mengikuti model pendidikan politik yang dilakukan PKS. Pendidikan politik kepada para pemilih melalui Prosima yang antara lain melalui sarsehan dengan tokoh-tokoh masyarakat biasanya melalui lembaga hikmah, melalui pendekatan pribadi, melalui Direct Selling. Disamping melalui menempuh jalur pelayanan masyarakat, seperti pelayanan kesehatan untuk secara tidak langsung melakukan pendidikan politik kepada masyarakat.

Kegiatan aksi serta advokasi untuk membantu dan meringankan masyarakat yang mengalami kesulitan khususnya dibidang kesehatan dan pertanian untuk kalangan masyarakat baik kota maupun pedesaan ini, nampaknya telah mengantarkan PKS menjadi partai politik yang dikenal sukses oleh masyarakat melalui aksi pelayanan sosial dan advokasinya sekaligus hal tersebut menjadi media terobosan untuk melakukan pendidikan politik bagi pemilih. Langkah dan strategi

tersebut pada akhirnya telah mengantarkan PKS di kabupaten Sleman menjadi partai yang diperhitungkan dan mendapatkan tempat di hati masyarakat.

Kesimpulan

Dari pemaparan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya kiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Sleman, sebagai salah satu partai politik yang keberadaannya dalam konstelasi kehidupan diakui syah secara hukum di Indonesia, menurut kemampuan yang dimilikinya telah menjalankan pendidikan politik bagi pemilih pada Pemilu 2004 khususnya untuk Pemilu legislatif, di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
2. Upaya pendidikan politik pada pemilih yang dilakukan oleh DPD PKS Kabupaten Sleman dalam melakukan pendidikan politik baik kepada anggota partai ataupun masyarakat yang terpenting adalah melalui institusi yang disebut Tarbiyyah Tsaqofiyah (TTs), dilengkapi dengan kegiatan Ta'lim Rutin Kelompok (TRK) dan Ta'lim Rutin Partai (TRP).
3. Pendidikan politik pada pemilih yang dilakukan oleh PKS DPD Kabupaten Sleman pada anggota partai dan masyarakat pada umumnya memiliki kontribusi yang positif pada peningkatan kualitas Pemilu tahun 2004 di Kabupaten Sleman baik pada tahapan proses Pemilu 2004 maupun pada hasil Pemilu 2004.

Saran

Pada akhir laporan ini kiranya perlu peneliti sampaikan saran kepada pencinta ilmu pengetahuan, pengamat politik, serta kepada politisi aktivis partai.

Pertama, model pendidikan politik yang telah dieksperimenkan

oleh PKS Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Sleman, memberikan kesempatan dan bacaan serta inspirasi untuk merumuskan suatu model pendidikan politik bagi partai-partai lain untuk lebih meningkatkan pengetahuan, kesadaran politik serta ketrampilan politik. Oleh karena itu diperlukan pengkajian yang lebih mendalam dan komprehensif tentang eksperimen-eksperimen pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik.

Kedua, model pendidikan politik yang dieksperimenkan oleh PKS DPD Kabupaten Sleman ‘Tarbiyyah Tsaqofiyah’ sekalipun merupakan suatu eksperimen yang dapat dikatakan berhasil, diakui masih memiliki keterbatasan untuk bisa menyentuh lapisan masyarakat yang kurang terpelajar.

Ketiga, Spesifikasi model pendidikan politik untuk kalangan masyarakat bawah seperti petani, buruh, pedagang asongan, perlu dikembangkan oleh partai politik untuk meningkatkan partisipasi politik warga negara dalam kegiatan politik. Partai Keadilan Sejahtera perlu secara serius memperhatikan pendidikan politik untuk kalangan akar rumput untuk memperluas dukungan serta memperkokoh basis dukungan kelas sosialnya.

Daftar Pustaka

- Abdul, Karim Zaidan. 2003. *Pemilu dan Parpol dalam Perspektif Syariah*. Bandung: Syammil Cipta Media.
- Abu, Ridha. 2002. *Pengantar Pendidikan Politik dalam Islam*. Bandung: Syammil Cipta Media.
- . 2003. *Saat Dakwah Memasuki Wilyah Politik*. Bandung: Syammil Cipta Media.
- . 2004. *Manusia dan Kekhilafahan*. Bandung: Syammil Cipta Media.
- . 2004. *‘amal Siyasi Gerakan Politik dalam Dakwah*.

Bandung: Syammil Cipta Media.

Alfian. 1987. *Pemikiran Politik dan Pembangunan Politik di Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Eep Saefullah Fatah. 2000. *Catatan Atas Gagalnya Orde Baru*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Huntington, Samuel P. 1999. *Gelombang Ketiga Demokrasi*. Jakarta: Grafiti.

----- . 1983. *Tertib Politik di Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jakarta : Rajawali Pers.

International IDEA, United Nations, dan IFES. 2001. *Sistem Pemilu*. n.p.: International IDEA, United Nations, dan IFES.

International IDEA. 1997. *Code of Conduct Ethical and Professional Administration of Elections*. Stockholm: Information Services, International IDEA.

Joko J Prihatmoko. 2004. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang: LP3M.

Lexy J. Moeleong. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Reilly, Ben. 1999. "Reformasi Sistem Pemilu di Indonesia: Berbagai Pilihan" dalam *API: Almanak Parpol Indonesia Pemilu '99*. Jakarta: Almanak Parpol Indonesia.

Self, Peter. 1990. *Political Theories Modern Government Role and Its Reform*. London: London School of Economic and Political.

Sorenson, Georg. 22003. *Demokrasi dan Demokratisasi, Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia Yang Sedang Berubah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ustman Ahmad. 2001. *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. Solo: Intermedia.

Sumber lain:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik

Panduan PROSIMA, DPD PKS Sleman, 2004.

Panduan PROSIDU, DPD PKS Sleman, 2004.

Pedoman Pengelolaan Partai, Dewan Pimpinan Daerah PKS, Sleman, 2004.

Team Ad Hoc Pemenangan Pemilu, DPD PKS Sleman, 2003.

Kurikulum Tarbiyah Islamiyah I Tahun 2000.

Kurikulum Tarbiyah Islamiyah II Tahun 2000.

Wawancara Mendalam

Wawancara dengan Ketua DPD PKS Kabupaten Sleman

Wawancara dengan Wakil Ketua DPD PKS Kabupten Sleman

Wawancara dengan Divisi Aksi Pemilu 2004 DPD PKS Kabupaten Sleman

Wawancara dengan Pengurus Bidang Pengkaderan DPD PKS Kabupaten Sleman

Wawancara dengan Pengurus DPC PKS Depok, Kabupaten Sleman

Klarifikasi dan Wawancara dengan peserta Pendidikan Politik (Tarbiyyah Tsaqofiyah)

Wawancara dengan alumni Pendidikan Politik, DPD PKS Sleman.